

# **ETIKA DAN KEMAJEMUKAN**

## **Mengembangkan Nilai Kebebasan dan Toleransi Sebagai Upaya Membangun Keagamaan yang Inklusif**

*Oleh Junifrius Gultom, M.Si, Ph.D*

### **Mengenang Gugurnya RIYANTO anggota BANSER NU Mojokerto**

*Peristiwa ini terjadi pada saat perayaan Natal tanggal 24 Desember 2000 di Gereja Eben Haezer Mojokerto Jatim. Banser NU (Nahdlatul Ulama) Riyanto adalah salah seorang anggota Banser dari 4 anggota Banser yang ditugaskan untuk mengamankan gereja oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Mojokerto. Dalam ibadah Natal tersebut, Riyanto bersama petugas pengamanan gereja dan polsek menemukan bungkusan mencurigakan di dalam gereja. Riyanto memberanikan diri membuka bungkusan tersebut. Ternyata bungkusan itu adalah bom. Tiba-tiba terlihat percikan api dari dalam bungkusan. Riyanto spontan berteriak: Tiarap!! Riyanto berusaha membuang bom keluar dari gereja agar tidak meledak di dalam gereja yang saat itu penuh jemaat yang menghadiri Natal.*

*Bom dilempar keluar oleh Riyanto ke saluran air, berharap bom akan jinak jika tergenang air, namun bom tak berhasil terbuang di saluran air, yang ada justru bom terpental jauh dari saluran air. Banser NU Riyanto ini dengan cepat mengambil kembali bom itu untuk dibuang lebih jauh lagi dari gereja.*

*Namun, diluar dugaan bom terlebih dahulu meledak. Bom meledak di pelukan pemuda NU berusia 25 tahun ini. Anggota Banser NU ini meninggal dunia di tempat dengan kondisi jari-jari dan wajah yang menyedihkan. Setengah badan hingga kepala terpental 400 meter dari lokasi terjadi dan baru dapat ditemukan 3 jam sesudahnya karena jatuh di bagian rumah penduduk sekitar yang letaknya agak tersembunyi dari pandangan mata bebas.*

*Kini sudah enam belas tahun semenjak peristiwa itu terjadi. Nama Riyanto sudah hampir tak pernah disebut lagi. Untuk mengenang pengorbanannya, kini sisa seragam Riyanto dipamerkan di Museum NU*

*di Jalan Gayungsari, Surabaya. Seragam loreng-loreng pucat itu dibiarkan terpajang dalam kondisi compang-camping oleh pengurus museum. Bekas darah mendiang Riyanto juga masih menempel di seragam tersebut (Tabloid Radar Mojokerto). –*

## **Kebebasan Menurut Alkitab**

Kebebasan menurut ajaran Alkitab, senantiasa dihubungkan dengan relasi yang mendalam dengan Allah dan sesama manusia. (Fletcher 2012, 38). Berkaitan dengan kebebasan negatif, Fletcher menguraikan dua pemahaman Alkitab yang penting yakni: Pertama, “kebebasan dari hasrat yang kurang luhur” (Fletcher 2012, 39) dan kedua, “kebebasan dari hambatan lahiriah, bahkan di tengah-tengah keadaan lahiriah yang kurang memuaskan” (Fletcher 2012, 39). Menarik bahwa Fletcher memahami kebebasan negatif itu hanya membuka peluang, bahwa manusia dianugerahi kebebasan sepenuhnya yang membuat manusia itu tidak lagi tunduk kepada perhambaan, namun haruslah di isi dengan kebebasan positif (Fletcher 2012, 39). Selanjutnya Fletcher mengutip prinsip Paulus dalam 1 Kor.9:19, dimana Paulus menyadari betul akan keadaan lahiriahnya yang bebas, namun sengaja ia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang (Fletcher 2012,39). Paulus mempergunakan kemerdekaannya untuk hal yang lebih tinggi. Jadi kebebasan bagi orang Kristen memiliki tujuan yang jelas yaitu kesetiaan kepada Tuhan, dan dengan kesetiaan itulah ia terus membaharui dirinya untuk melawan hasrat egoisnya, sehingga dari hari ke hari ia dibaharui sebagai hamba Yesus Kristus (Fletcher 2012, 41).

Etika seperti yang diuraikan di atas memang cukup membekali orang Kristen untuk menjadi garam dan terang dunia, supaya memiliki keseimbangan dalam mengejawantahkan kebebasannya, namun dalam negara yang mayoritas beragama lain apakah pemahaman ini relevan? Kelihatannya tuntunan etika Perjanjian Lama mungkin akan lebih bergaung seperti Amos 5:24” Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Teks ini kelihatan menjadi tuntunan etis yang tepat, teristimewa penggunaan kata keadilan (Ibr. *misypat*) dapat diartikan sebagai keputusan hukum yang tepat (Barth dan Marie 2010, 316). Ini merupakan desakan

nabi kepada umat supaya mereka bebas dari ancaman penghukuman. Dalam konteks Indonesia yang jelas-jelas hukum dan penegakan hukumnya bermasalah perlu ada perjuangan lintas agama untuk mendorong penegakan hukum. Untuk perjuangan ini orang Kristen tidak boleh lelah. Barangkali kasus GKI Yasmin di Bogor bisa menjadi titik juang bersama untuk menegakan amar keputusan hukum tertinggi di Indonesia. Untuk kasus ini terlihat jelas lintas agama, bahkan lintas golongan mamiliki keprihatinan bersama.

Dengan demikian ada dua hal yang dapat disumbangkan oleh pemikiran etika Kristen terhadap wacana kebebasan di Indonesia, Pertama bahwa Etika Kristen sangat menaruh perhatian yang besar mendorong umat Tuhan untuk mengalami kebebasan. Dasar yang sangat penting dalam merengkuh kebebasan itu ialah hubungan pribadi dengan Tuhan yang menjadi sumber kebebasannya dan dari sumber itu mengalir kebebasan yang berkualitas dalam wujud pelayanan yang mengosongkan diri. Kedua bahwa kebebasan di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu yang sangat mendesak, dalam wujud perjuangan penegakan hukum untuk melindungi kebebasan itu sendiri.

### **Kebebasan Yang Toleran**

Kisah Riyanto yang dituliskan di bagian awal artikel ini menjadi bukti bahwa kebebasan memeluk agama dapat dihayati tanpa harus mengingkari toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagi Riyanto penghayatan ke-Islaman dirinya terwujud dalam ekspresi yang paling tinggi yaitu mentoleransikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa sesama yang berbeda dengan dirinya. Riyanto menjadi pejuang toleransi antar umat beragama di Indonesia. Riyanto berhasil menjadikan agama yang dianutnya untuk menjadikan dirinya lebih bermartabat yaitu berguna bagi sesamanya.

Kebebasan adalah gambaran dari martabat manusia, ketika manusia tidak bebas maka ia kurang beradab dan ketika kebebasannya melampaui batas ia menjadi biadab. Karena itu penting untuk menjadikan kebebasan menjadi pengalaman yang

nyata sebagai gambaran kebebasan Kristus. Rumusan Yohanes Pembaptis yang dikutip di depan, kiranya menjadi kata dorongan untuk merengkuh kebebasan, yakni tahu membuat batasan yang pas dan cocok, memberikan kegembiraan bagi banyak orang.

Kebebasan negatif maupun kebebasan positif sama pentingnya dan saling melengkapi untuk membentuk insan yang bebas. Kiranya ungkapan Fletcher kebebasan negatif harus diperlengkapi dengan kebebasan positif, membuat etika Kristen semakin kritis, teristimewa dalam bingkai Kebhinekaan, yang nota bene kebebasan sering terperosok kepada suara kepentingan masing-masing.

Kebhinekaan Indonesia kiranya menjadi kesadaran baru etis secara dalam membuat segala bentuk regulasi hukum di Indonesia, yang didalamnya terlihat masyarakat sipil yang setara.

### **Inklusifisme di mata Ratzinger**

Ratzinger mengatakan dalam masalah relasi antara agama, iman dan budaya: “Kita dapat mengelompokkannya ke dalam tiga konsep yaitu eksklusifisme, inklusifisme dan pluralism.” Menurutnya, harus diakui secara jujur bahwa bagi kehidupan Kristen saat ini sudah tidak lagi relevan untuk memposisikan diri dalam eksklusifisme dalam kerangka berpikir menyangkal adanya keselamatan bagi yang lain atau yang non-kristiani. Ratzinger juga mencoba menjelaskan pandangan Karl Barth yang mengindikasikan bahwa “eksklusifisme” Barth sepertinya terkait dengan fenomena “ke-agama-an” – tidak secara spesifik menunjuk kepada “agama-agama yang lain” – dan secara luas, hal tersebut tidak secara langsung menyentuh pertanyaan tentang keselamatan bagi agama lain. Yang terpenting, dalam merespons pertanyaan mengenai hubungan antara iman Kristen dan agama-agama dunia, masih ada dua kemungkinan yaitu inklusifisme dan pluralisme (Ratzinger 2004, 80).

Sementara itu, inklusifisme juga mendapat penolakan umum karena dianggap sebagai salah satu jenis dari imperialisme Kristen. Ratzinger menegaskan bahwa bukanlah urusan kita melihat agama lain diarahkan kepada akhir dari segala sesuatu

yaitu Kristus dan mengambil alih mereka seperti dalam pemikiran kekristenan selama ini. Ratzinger kemudian mengutip pernyataan Karl Rahner yang mengatakan bahwa sebagai seorang kristen, kita “tidak dapat meninggalkan anggapan tersebut”, inklusifisme merupakan inti dari sejarah keagamaan dan budaya manusia, yang tentunya tidak terbentuk sama seperti pluralisme yang tepat/sempurna. Pluralisme dalam bentuknya yang radikal, akhirnya menyangkal kesatuan umat manusia dan kedinamisan sejarah yang merupakan suatu proses dari berbagai keanekaragaman kesatuan (Ratzinger 2004, 81).

Ratzinger kemudian menjelaskan bahwa pada proses kesatuan berbagai keanekaragaman, poin sesungguhnya yang harus dipahami orang Kristen adalah keselamatan yang ditawarkan dalam Kristus, yang bukan hanya dari suatu budaya melainkan berasal dari atas dan tidak serta-merta “menyedot” segala sesuatu. Tersedia ruang bagi pengalaman spiritual yang besar dari manusia, yang digambarkan Ratzinger dengan berbagai nada yang menghasilkan harmoni; inilah apa yang sebenarnya umat Kristen lihat sebagai bayangan keagungan Pentakosta. Pada peristiwa Pentakosta, tersedia tidak hanya satu bahasa bagi para hadirin yang datang ketika itu. Hal ini sama dengan keanekaragaman bahasa di Babilon (contoh budaya penerimaan dan kekuasaan) yang menandakan kesatuan dapat mengatasi keanekaragaman. Bahasa (budaya) yang bervariasi dapat dipahami sama dalam satu Roh. Bahasa tersebut tidak saling meniadakan karena tumpang tindih satu dengan yang lain melainkan bersama-sama menciptakan harmoni. Dari sudut pandang sebuah fenomenologis, yang harus diperhatikan sebagai elemen baru yang khas dari kekristenan adalah cara agama Kristen tidak serta merta mengambil tempat dalam sejarah sebagai “agama absolut” di antara “agama-agama saudaranya” (Ratzinger 2004, 81-82).

Pluralisme agama belaka, tidak dapat menjadi kata terakhir bagi kita saat ini. Kita juga harus menggantikan inklusifisme yang selama ini telah digunakan dalam sejarah agama-agama dan tentunya memiliki arti dan makna yang berbeda. Tidak mungkin menyatakan sebuah agama sebagai agama yang satu-satunya benar dan ‘menyedot’ yang lain untuk

turut menerima keselamatan (Ratzinger 2004, 83). Ratzinger juga memberikan pesannya dalam sebuah wawancara tentang wawasan ekumenis dan kesatuan bahwa yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana masing-masing orang secara konsisten mengingat kembali inti dari hidup berimannya, mencoba untuk berbicara keluar dan tetap menggenggam inti iman itu sendiri. Dalam konsistensi terhadap ciri masing-masing, bukan tidak mungkin kita dapat sepakat atau melihat titik temu tentang kebaikan dan kebenaran dalam berbagai hal. Harus diakui bahwa tidak mudah untuk mencapai suatu 'pengakuan bersama', namun hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menerima satu sama lain dengan rasa saling menerima yang besar, dengan kasih, kita mengenal satu sama lain sebagai orang-orang Kristen, dan yang penting lagi kita mempunyai tugas dan tanggungjawab bersama untuk membawa kesaksian kepada dunia, baik dengan membentuk dialog yang baik untuk menjawab pertanyaan tentang Allah, tentang asal dan tujuan manusia (Ratzinger 1997, 243).

### **Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia**

Hidup berbangsa di Indonesia sangat kental dengan keberagamannya dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 17.800 pulau besar dan kecil terdapat 656 etnik besar dan kecil lengkap dengan kebudayaan dan tradisi masing-masing. Terdapat juga enam agama yang diakui di samping berbagai macam kepercayaan lainnya. Dulu semangat lokal untuk merdeka dari penjajahan ternyata melemahkan perjuangan ketika hanya berada di daerah itu saja. Namun ketika bersama lewat perbincangan, dialog, diskusi dan semangat kesatuan tercipta maka boleh dikatakan Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia dan semua elemen dapat menerima bahkan menjunjung tinggi dasar tersebut.

Keadaan damai itu belakangan ini kian terusik dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lintas agama dan budaya. Hal ini terjadi akibat manajemen masyarakat majemuk masih menyisakan peluang terjadinya penindasan atas kaum minoritas, mengeksploitasi kelompok tertentu untuk melanggengkan *rezim status quo*. Di bagian pendahuluan telah

disebutkan beberapa peristiwa hitam di Indonesia. Asvi Warman Adam (Ahli peneliti utama LIPI) melaporkan bahwa sejak zaman kolonial juga sudah terjadi kekerasan. Rezim Orde Baru, tindak kekerasan masih dipertahankan untuk melanggengkan kekuasaannya (Asvi 2010, 57-59). Dengan demikian kekerasan itu sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Radhar Panca Dahana (budayawan Indonesia) melihat akar kekerasan tersebut disebabkan oleh: pertama, kondisi ekonomi yaitu maraknya kemiskinan dan dalamnya jarak perbedaan yang kaya dan miskin. Kedua, kondisi sosial yang mencekam. Mereka frustrasi akibat eksploitasi habis-habisan, cenderung membela kepentingan masing-masing dan tidak mampu berbuat untuk orang lain. Ketiga, kondisi hukum yang terdapat ketimpangan. Penguasa memakai hukum untuk kepentingan pribadi dengan mengenyampingkan kepentingan umum. Keempat, penguasa hanya mengurus kepentingannya belaka tanpa memperhatikan tanggung jawab bagi masyarakat (Radhar 2010, 26-31). Akar persoalan ini pun berdampak ketika terjadi gesekan di lintas agama. Seperti mencuatnya isu pluralisme, Keputusan Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan islamisasi maupun kristenisasi serta isu-isu lainnya. Sehingga diyakini terjadi kesalahpahaman untuk memahami pluralisme dan multikulturalisme yang seharusnya perlu disikapi dengan cara yang benar sebagai kekayaan.

Belakangan ini para teolog dan pemuka agama dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di lintas agama dan budaya, menyepakati agar diadakan dialog untuk membicarakan dengan pikiran jernih. Bersama-sama menolak tindak kekerasan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Pemerintah juga diharapkan dukungannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada setiap kelompok dan penganut agama yang ada. Hendaknya setiap orang mengakui perbedaan yang ada pada masing-masing tapi juga menghargai kesetaraan dan memupuknya di dalam kehidupan agar dapat hidup saling berdampingan dengan terciptanya hidup yang harmonis dan nyaman.

## **Kebhinekaan Indonesia**

Dua dekade terakhir ini, Indonesia semakin sulit membuktikan dirinya sebagai negara yang memiliki toleransi umat beragama dan mengakui 'yang berbeda' sebagai sesama. Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya bulan Mei tahun ini, kembali memberikan perhatian khususnya terhadap hal ini (Sukidi, 2012). Mudah sekali untuk membuktikan bahwa eksklusifisme memiliki eskalasi yang makin memuncak seiring gelombang radikal global. Seperti yang dikutip Benny Susetyo dari data yang dimiliki oleh Setara Institute, satu semester terakhir ini saja, ada 129 kejadian intoleransi beragama di 22 provinsi di Indonesia (Susetyo, Kompas), betapa meluasnya sikap yang keliru dalam mengekspresikan keyakinan di dalam masyarakat yang majemuk seperti takdir negeri ini. Kelihatan semakin banyak mengemuka, bahwa sebahagian orang di negeri ini semakin merasa bebas untuk tidak mengakui kehadiran orang yang berbeda dengan dirinya. Bentuk-bentuk kebebasan untuk menyangkal keberadaan sesama yang berbeda agama, ataupun aliran agama, suku dan golongan mengemuka dengan aksi-aksi kekerasan dan pendekatan radikalisme. Benarlah kiranya pendapat Hardiman yang memakai teori Arendt, bahwa "akar-akar kekerasan terletak pada kerinduan untuk menemukan rasa kepastian dan identitas" (Hardiman 2011: 52,53).

Hal ini akan lebih mudah lagi dibaca dalam kegiatan terorisme di Indonesia, yang pada awalnya ingin menegakkan ideologi tertentu seperti yang diindoktrinasi oleh agama, dengan jalan jihad di dalam nuansa yang sempit terhadap pengaruh bangsa Barat yang diasumsikan musuh agamanya, kini memuliakan Tuhan diekspresikan dengan melawan apartur keamanan, karena merasa kebebasan mereka dihalangi. Jadi ada indikasi sasaran kekerasan yang semakin meluas cakupannya. Celakanya lagi kalau diperhatikan dengan saksama, kegiatan intoleransi apalagi terorisme itu adalah kegiatan dalam kesadaran manusia yang bebas, terbukti mereka memiliki tujuan yang jelas. Ada proses yang panjang di mana mereka membentuk diri, sehingga merasa bahwa kegiatan mereka itu benar. Kalau orang yang menjadi pelaku kekerasan, terbukti melakukannya karena proses indoktrinasi.

## **Kebebasan dan Toleransi Beragama di Indonesia**

Kata bebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb dng leluasa); lepas dr (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dsb) ;tidak dikenakan (pajak, hukuman, dsb); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dsb; merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing); tidak terdapat (didapati) lagi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia on line, s.v. bebas).

Pengertian ini kelihatannya belum cukup kuat untuk memberikan pandangan bahwa dalam kata kebebasan ada dua aspek yang sering muncul yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melihat kebebasan lebih banyak dari sudut kebebasan negatif. Kebebasan negatif berkaitan dengan “bebas dari....” (Bertens 2011,125). Kebebasan ini mencerminkan terlepasnya manusia dari segala hal yang merintanginya untuk melakukan keinginannya. Sedangkan kebebasan positif berkaitan dengan “kebebasan untuk....” (Bertens 2011,126). Kebebasan di sini lebih terarah kepada hak untuk menikmati hal-hal yang bermanfaat bagi diri seseorang.

Isaiah Berlin dalam buku, “*Empat Esai Kebebasan*”, mengulas kebebasan dari dua sisi tersebut (Berlin 2004,227). Ia menjelaskan bahwa kebebasan negatif ada dalam rangka menjawab pertanyaan “Dalam wilayah apa suatu subjek—seorang manusia atau sekelompok manusia—harus dibiarkan bertindak atau berkehendak sebagaimana yang ia sendiri mampu lakukan atau inginkan, tanpa campur tangan dari orang lain?” (Berlin 2004 231). Sementara untuk menjelaskan cakupan dari kebebasan positif, menjawab pertanyaan, “Apa, atau siapa, yang merupakan sumber kontrol atau campur tangan yang dapat menentukan seseorang untuk melakukan atau menghendaki hal ini dan bukan hal itu?” (Berlin 2004,231). Cakupan kedua pertanyaan ini tentunya mempertegas bahwa kebebasan itu bukan suatu status kodrati yang sudah diterima manusia sejak ia lahir, sehingga ia bebas dari segala intervensi, tetapi juga ada kerumitan nilai baik dari sang pribadi yang bebas maupun dari kepekaanya terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. Kebebasan selalu mengandaikan keberadaan orang lain, sama seperti sejak kelahirannya manusia sudah ada di tengah-tengah suatu realitas

sosial, bahkan menggugat atas nama siapa melakukan sesuatu. Apakah itu mencerminkan kebebasan atau tidak?

Isaiah Berlin sangat tertarik kepada pengertian kebebasan negatif, karena itu dengan sangat tajam ia menguraikan, bahwa kebebasan tersebut adalah gambaran martabat manusia, semakin manusia “bebas dari” maka manusia semakin mampu untuk mewujudkan pribadinya yang utuh, sebaliknya keruntuhannya akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia (Berlin 2004,241). Di sini manusia yang bebas adalah manusia yang mengejar keinginannya sesuai dengan tujuannya sendiri (Berlin 2004,238). Tentu ini akan menyulut pertanyaan, apa jadinya masyarakat pada akhirnya kalau tiap-tiap orang menurut cara dan kemauannya sendiri? Bahkan peradaban yang disebutkan di atas pasti akan hancur berkeping-keping, menjadi sebuah kebiadaban! Karena itu dalam kebebasan ini pun perlu ditetapkan garis batasnya, yang menurut Berlin garis batas perlu untuk mengenali kebebasan itu sendiri (Berlin 2004, 238). Dalam kebebasan negatif ini, pribadi yang bebas itu masih mengakui pribadi yang lain (pluralisme).

Sedangkan kebebasan positif, menurut Berlin adalah kebebasan “yang bersumber dari keinginan yang ada dalam diri seorang individu untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri” (Berlin 2004, 244). Ini kiranya jelas sekali berpusat pada subjek. Seorang ingin menjadi apa yang ia inginkan, tidak mau tunduk kepada apa dan siapa pun. Ia akan berpedoman kepada rasionya sendiri. Berlin melihat kebebasan positif memiliki pengaruh kuat dalam pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, namun ini menjadi berbahaya ketika mereka dikuasai oleh nafsu mereka sendiri, maka mereka bisa menjadi budak bagi dirinya sendiri (Berlin 2004,244). Belum lagi tingkat kepuasan terhadap kebebasan yang tidak akan pernah cukup. Di sini sering kebebasan menjadi pemaksaan kehendak bagi orang lain, teristimewa ketika seseorang merasa idenya adalah kebenaran yang mutlak. Bisa jadi orang yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan positif ini, menutup diri pada kebenarannya sendiri dan menjadi tidak toleran kepada orang yang berbeda dengan dia. Kalau sudah sampai pada tingkat seperti ini, maka kebebasan itu perlu digugat.

Kemajemukan adalah merupakan wajah asli Indonesia sejak berdirinya menjadi sebuah bangsa dan negara. Karena itu sudah dapat diduga bahwa persoalan-persoalan akan muncul dari keberadaan ini. Menurut Hardiman potensi kekerasan di Indonesia sudah menguak dalam bentuk kekerasan massal sejak tahun 60-an (Hardiman 2011, 73). Ini berarti bahwa sejak itu ada tendensi untuk melakukan kekerasan kepada orang yang berbeda secara massal. Data ini tentu bisa diurutkan sampai jatuhnya Suharto dan setelah itu hingga kini. Dengan kata lain ini menjadi bahaya laten, yang sebenarnya mau tidak mau setiap ada gesekan kearah sana, negara ini perlu waspada.

Kekerasan itu sendiri dapat dirunut dari penyalahgunaan kebebasan, dalam pemahaman Berlin itu merupakan aplikasi dari kebebasan positif, yang diartikan “bebas untuk”. Orang-orang yang merasa dirinya lebih benar, merasa sah-sah saja untuk memaksakan pemahamannya kepada orang lain dengan segala cara. Merasa mulia untuk menghancurkan orang-orang yang menghalang-halangi mereka. Dalam hal ini hasil satu-satunya ialah kalah atau menang, dan ini adalah bahasa khas dari kekerasan. Oleh sebab itu diperlukan tindakan preventif. Tindakan preventif ini tentunya perlu koridor hukum yang jelas dan tegas, yang disepakati bersama-sama dalam sebuah bangsa dan negara yang berdaulat.

Kebebasan di Indonesia yang rakyatnya majemuk, kiranya harus diatur dalam regulasi yang berdasar kepada kemajemukan pula. Artinya diatur dengan dasar yang tegas sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wacana ini sangat mendesak sebab ada dugaan bahwa ada perda-perda yang memiliki nilai-nilai yang menabur kebencian (Susetyo, 2012).

Kebebasan di Indonesia kini sedang ada dalam keprihatinan, karena itu semakin banyak seruan supaya pemerintah tegas terhadap siapapun yang memberlakukan kebebasannya yang terang-terangan telah mencederai kebebasan orang lain (Hardiman, 2012). Kesetaraan sebagai warga negara kini semakin mendesak untuk ditegakkan, supaya Indonesia menjadi rumah bagi semua warganya. Apalagi sering terdengar

sesumbar dalam retorika, Indonesia diklaim sebagai masyarakat sipil yang modern, maka haruslah dibarengi penegakan hukum yang tegas.

Kebhinekaan adalah sebuah masalah etis. Dulu ketika berbicara tentang Kebhinekaan asosiasi terarah kepada pentingnya persatuan dan kesatuan, namun kini Kebhinekaan Indonesia adalah masalah etis, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berpolitik. Setiap pihak harus semakin peka akan makna Kebhinekaan untuk menumbuhkan kebebasan dan nuansa inklusif di dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Tentu masih menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan apakah ada model kebebasan dalam bingkai Kebhinekaan ini?

### Daftar Acuan

Artikel dalam Koran Radar Mojokerto, 14 Desember 2016.

Adam, Asvi Warman 2010. Sejarah Kekerasan dan Kekerasan Sejarah. Maarif Institute – vol.5, No. 2 – Desember 2010: 57-62.

Barth, Christoph, dan Marie-Claire Barth-Formmel. 2011. *Teologi Perjanjian lama 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Berlin, Isaiah. 2004. *Empat esai kebebasan*. Terj.A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia

Bertens, K. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dahana, Radhar Panca 2010. Kekerasan di Batin Kita. Maarif Institute – vol.5, No. 2 – Desember 2010: 26-33

Fletcher, Verne H. 2012. *Lihatlah Sang Manusia! Suatu pendekatan pada etika Kristen dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Hardiman, F. Budi. 2011. *Massa, Teror, Trauma. Menggeledah negativitas Masyarakat Kita*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera

- Hardiman, F. Budi. 2012 .Toleransi atas intoleransi. *Kompas* 30 Mei.
- Livingston, James C. et.al. 2006. *Modern Christian Thought: the twentieth century*. Minneapolis: Fortress Press.
- Ratzinger, Joseph Cardinal. 2004. *Truth and Tolerance*. San Francisco : Ignatius Press.
- Stob, Henry.1957. *The Christian concept of freedom*. Michigan: Grand Rapids
- Sukidi. 2012. Kebhinekaan Indonesia. *Kompas* 5 Juni.
- Susetyo, Benni. 2012. Toleransi terhadap intoleransi. *Kompas* 08 September.